

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau *outcome*, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja

dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala	Kategori				
86 s/d 100	Baik		Sangat Baik		Sangat Berhasil
70 s/d 85	Sedang	atau	Baik	Atau	Berhasil
55 s/d 69	Kurang		Sedang		Cukup Berhasil
Kurang dari 55	Sangat Kurang		Kurang Baik		Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 mestinya dilakukan terhadap dokumen penetapan kinerja yang telah disusun pada awal tahun 2012. Namun demikian, menindaklanjuti hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Juni 2012, terdapat beberapa catatan penting atas penyusunan LAKIP Tahun 2011.

Selain catatan atas LAKIP 2011, juga ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyusunan LAKIP 2012. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan upaya perbaikan penyusunan LAKIP Tahun 2012 sebagaimana rekomendasi BPKP tersebut. Meskipun demikian perbaikan belum sepenuhnya bisa dilakukan atas keseluruhan rekomendasi yang dikeluarkan BPKP.

Dengan mempertimbangkan keluarnya penilaian dan rekomendasi BPKP tersebut pada bulan Juni 2012, yakni ketika tahun anggaran sudah berjalan dan penetapan kinerja sudah disusun, maka upaya memperbaiki penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo

dilakukan dengan penyelarasan pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan indikator kinerja atas sasaran strategis tersebut. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah (RPJMD), renstra SKPD dan dokumen pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010.

Sehingga, pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan terhadap penetapan kinerja yang telah diselaraskan sebagaimana diuraikan dalam BAB II poin perjanjian kinerja. Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self asassment*) atas sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 maka diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Penanggulangan Kemiskinan	97
2.	Pendidikan	94.15
3.	Kesehatan dan Keluarga Berencana	92.6
4.	Infrastruktur	54.04
5.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	101.73
6.	Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi	103
7.	Iklm dan Investasi Usaha	107.15
8.	Energi dan Sumber Daya Mineral	59.25
9.	Lingkungan hidup dan Penaggulangan Bencana	120.66
10.	Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh	106.5
11.	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	72.4

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, untuk tahun 2012 diukur dari

capaian atas indikator sasaran strategis prioritas pembangunan tahun 2012 sebagai berikut:

Prioritas pertama: Penanggulangan kemiskinan

Prioritas ini mencakup dua sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu:

- 1) Penanggulangan kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkan beberapa program pembangunan yang diharapkan mampu mendorong penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo. Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang diharapkan mampu mempercepat penurunan persentase penduduk miskin tersebut antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin, pengembangan modal dana bergulir bagi masyarakat miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi masyarakat miskin untuk mendorong mereka menjadi kelompok yang lebih produktif melalui usaha yang mereka lakukan. Upaya yang dilakukan juga tidak hanya berhenti pada peningkatan ketrampilan tetapi juga membuka akses modal bagi masyarakat miskin dengan model bantuan modal bergulir. Dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat miskin akan bergeser kearah yang lebih produktif dan mampu meningkatkan pendapatannya.

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut menjadi masih jauh dari kebutuhan di lapangan. Ini bila kita lihat dari capaian kinerja tahun 2012, dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo justru mengalami peningkatan. Target kinerja yang ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 persentase penduduk miskin turun menjadi 18%. Namun realisasinya justru meningkat mencapai 23.97%. Dengan kata lain capaian kinerja hanya 75.09%.

Salah satu faktor meningkatnya persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo karena naiknya harga kebutuhan pokok. Dengan inflasi yang mencapai 5.33 menyebabkan penduduk yang semula berada di atas garis kemiskinan menjadi bergeser masuk dalam kategori penduduk miskin karena tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Beberapa hal penting terkait capaian tersebut antara lain:

- Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan metode pemberdayaan, efektivitasnya seringkali belum bisa dilihat dalam jangka pendek.
- Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif sering tidak berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Pada prakteknya seringkali usaha yang dirintis untuk keluar dari situasi kemiskinan juga tidak berhasil dengan singkat. Bahkan beberapa usaha kecil yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat miskin sangat lemah dalam menghadapi persaingan sehingga tidak berlanjut.
- Keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan. Sehingga mampu saling bersinergi dan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. Perlu dibangun satu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat miskin selalu berhadapan dengan situasi yang kompleks. Miskin sumber daya, miskin akses dan juga seringkali miskin motivasi.

2) Peningkatan kesempatan kerja

Capaian sasaran strategis ini diukur dari dua indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Dari pengukuran dua indikator tersebut capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut mencapai 118.84 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2012.

a) Tingkat partisipasi angkatan kerja

Mengikuti data yang dikeluarkan BPS tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Wonosobo mencapai 72.00 persen. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD yang hanya 42 persen. Sehingga apabila dibandingkan dengan realisasinya capaian kinerja untuk indikator kinerja ini mencapai 171.42 persen. Untuk kedepan hal penting yang perlu dilakukan adalah target Penetapan Kinerja yang lebih progresif sehingga mampu melecut capaian kinerja riil yang lebih baik.

b) Tingkat pengangguran terbuka

Untuk tingkat pengangguran terbuka sesuai data yang dikeluarkan BPS, mencapai 5.70 persen. Bila dibandingkan dengan target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 3.34 persen maka realisasi capaian kinerjanya hanya 66.26 persen jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut juga dibawah capaian tahun lalu yang mencapai 4.04 persen. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi capaian Kabupaten Wonosobo masih lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka untuk Provinsi Jawa Tengah mencapai 5.93 persen dan untuk tingkat nasional mencapai 6.56 persen.

Prioritas kedua: Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 adalah peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah. Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mencapai 94.15%. Pengukuran capaian strategis ini menggunakan beberapa indikator yaitu:

Capaian kinerja untuk pendidikan dasar 9 tahun diukur dari indikator:

- 1) APM SD/MI
- 2) Angka Putus Sekolah SD/MI
- 3) Angka lulus SD/MI
- 4) APM SMP/MTs/Paket B
- 5) APK SMP/MTs/Paket B

Capaian kinerja bidang pendidikan dengan sasaran strategis peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencapai 95.30 % Capaian ini sudah cukup baik meskipun belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 untuk APM SMP/MTS mengalami penurunan 13.37.

Disisi lain ada beberapa capaian yang mengalami perkembangan cukup menggembirakan antara lain:

- menurunnya angka putus sekolah di jenjang pendidikan SMP
- meningkatnya angka kelulusan di tingkat SMP/MTS
- meningkatnya angka melanjutkan ke tingkat SMP/MTS

Capaian kinerja program pendidikan menengah diukur dari indikator:

- 1) APK SMA/SMK/MA
- 2) APM SMA/SMK/MA
- 3) Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA
- 4) Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA

Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pendidikan menengah capaian kinerja tahun 2012 mencapai 93%. Terkait

pencapaian APK SMA/SMK/MA belum mencapai target yang telah ditetapkan bahkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah juga masih cukup tinggi. Meskipun Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah melakukan upaya melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Untuk persentase kelulusan pada jenjang pendidikan menengah capaian kinerjanya cukup bagus. Realisasi kinerja untuk indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk peningkatan kinerja pendidikan menengah kedepan masih perlu terus ditingkatkan salah satunya terkait distribusi guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA agar rasio antara guru dan siswa komposisinya lebih mendekati kondisi yang diharapkan.

Secara sosiologis pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan pergerakan kearah yang lebih positif. Faktor sosial budaya masyarakat yang semula menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan pendidikan, saat ini sudah lebih terbuka dan asertif terhadap program-program pendidikan. Pergeseran tersebut antara lain didorong oleh:

- Meningkatnya kesempatan kerja di sektor formal yang mensyaratkan pendidikan formal. Meskipun dalam skala yang masih kecil namun tumbuhnya usaha yang bergerak dibidang jasa seperti jasa keuangan dan sebagainya di Kabupaten Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir telah memberi harapan bagi mereka yang memiliki pendidikan formal. Terutama untuk pendidikan menengah.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Partisipasi masyarakat ini bisa dilihat dari tumbuhnya lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Terutama lembaga pendidikan yang memadukan kurikulum pendidikan umum dengan kurikulum pendidikan agama. Lembaga tersebut telah menjawab

kebutuhan sebagian masyarakat yang menginginkan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan. Sehingga pesantren yang juga menyediakan akses pada pendidikan formal kemudian banyak diminati masyarakat.

Prioritas Ketiga Bidang Kesehatan dan KB

Dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 mencakup tiga sasaran strategis sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
- Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB
- Penurunan laju pertumbuhan penduduk

Capaian kinerja bidang kesehatan dan keluarga berencana mencapai 92.60 persen. Capaian ini diukur dari capaian kinerja tiga sasaran strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui penetapan sasaran strategis ini sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas. Upaya yang dilakukan

antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Dalam hal ini PKD dan Puskesmas menjadi instrumen penting bagi pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Bentuk kesungguhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo salah satunya dilakukan melalui sertifikasi mutu pelayanan di puskesmas. Meskipun sebagai langkah awal baru bisa dilakukan di satu puskesmas. Diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi puskesmas lain dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk PKD yang saat ini sudah tersebar di desa-desa, pemerintah kabupaten juga terus berupaya untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama terkait dengan persalinan. Meskipun kedepan sesungguhnya peran PKD juga untuk mendorong agar masyarakat lebih berorientasi pada hidup bersih dan sehat. Selain itu juga untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan di lingkungannya.

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase desa/ kelurahan UCI, capaian kinerja dari indikator ini adalah 98.87 persen dimana target tahun 2012 desa/kelurahan UCI ditargetkan 100 persen tetapi sampai akhir tahun 2012 realisasinya baru mencapai 98.87 persen.
- 2) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas, target tahun 2012 99 persen penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas. Tetapi realisasinya baru mencapai 98.57 persen sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 99.56 persen.
- 3) Persentase penduduk memiliki jamban sehat, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan penduduk yang memiliki jamban sehat sebesar 45 persen. Sampai dengan akhir tahun realisasinya mencapai 49.46 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 109.91 persen melampaui target yang ditetapkan.
- 4) Persentase makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, capaian kinerja indikator ini hanya mencapai 51.67 persen. Capaian kinerja ini diperoleh dari pengukuran terhadap target yang ditetapkan yaitu 60 % makanan minuman

memenuhi syarat kesehatan, tetapi sampai dengan akhir tahun realisasinya hanya 31 persen.

- 5) Persentase rumah tangga sehat, target kinerja untuk indikator ini sebesar 50 persen rumah tangga sehat. Target tersebut mampu terlampaui dengan realisasi rumah tangga sehat mencapai 51.17 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 102.34 persen.
- 6) Persentase PKD aktif, untuk PKD aktif, pada tahun 2012 target Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah 50 persen PKD aktif. Tetapi realisasinya sampai akhir tahun 2012 PKD aktif baru mencapai 40 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini baru mencapai 80 persen dari target.
- 7) Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan, Target kinerja indikator ini adalah 98 persen kebutuhan obat, alat kesehatan, serum dan reagensia untuk pelayanan kesehatan tercukupi. Realisasinya target tersebut mampu terlampaui dari target 98 persen realisasinya mencapai 100 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 102.04 persen.
- 8) Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 100 persen pelayanan kesehatan sesuai standar. Target tersebut mampu tercapai dengan baik sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen.
- 9) Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, target kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Namun sampai akhir tahun 2012 menurut catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, realisasinya baru mencapai 10.72 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini baru mencapai 10.72 persen.

10) Persentase peserta jaminan kesehatan yang dilayani. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 3 persen peserta jaminan kesehatan terlayani. Namun dari target itu baru terlayani 2.5 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini baru mencapai 83.33 persen.

Dari pengukuran kinerja atas sepuluh indikator diatas, capaian kinerja untuk sasaran peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2012 mencapai 83.84 persen. Capaian ini dapat dikategorikan berhasil. Namun demikian capaian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena pada beberapa indikator capaian kinerjanya masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan.

Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan dalam pencapaian target kinerja. Seperti pada indikator presentase PKD aktif. Rendahnya capaian kinerja ini salah satunya karena bidan desa sebagai motor PKD belum bisa memberikan pelayanan secara optimal karena masih diperbantukan juga di Puskesmas. Terkait dengan pelayanan untuk peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin juga masih perlu terus dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami prosedur dan tata cara untuk mengakses layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

2) Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

Capaian kinerja untuk sasaran strategis peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB atas target yang telah ditetapkan adalah sebesar 87.18%. Capaian ini diperoleh dari pengukuran atas indikator kinerja dari sasaran strategis. Secara rinci capaian dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas dan jangkauan layanan KB adalah sebagai berikut:

- a) Persentase KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR), untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 96.71 persen. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 84.86% tetapi sampai dengan akhir tahun 2012 realisasinya hanya sebesar 82.07%.
- b) Persentase drop out KB, target tahun 2012 yang telah ditetapkan adalah 8.08 persen. Sedangkan realisasinya jauh diatas target yaitu 17.30 persen. Dengan realisasi tersebut capaian kerjanya hanya 46.70 persen.
- c) Jumlah pasangan subur yang menjadi peserta KB baru. Untuk indikator ini capaian kinerja tahun 2012 mencapai 108.10 persen. Capaian kinerja ini diperoleh karena target yang ditetapkan 23.140 tetapi realisasi mencapai 25.014.
- d) Rasio penyuluh/ petugas KB dengan desa/ kelurahan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 97.22 persen. Capaian ini dibawah target tahun 2012. Dimana target rasio antara petugas/ penyuluh KB dengan desa/kelurahan adalah 1:3.5 tetapi realisasinya 1:3.63.

Kualitas dan jangkauan layanan KB menjadi salah satu isu strategis bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 dan beberapa tahun kedepan. Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar adalah wilayah pegunungan menjadikan kualitas dan jangkauan pelayanan KB di Kabupaten Wonosobo masih perlu terus ditingkatkan. Akses beberapa desa yang tersebar di berbagai kecamatan masih relatif sulit karena kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum baik. Belum lagi beberapa daerah rawan longsor sehingga menghambat capaian kinerja untuk layanan KB.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melihat pentingnya kualitas dan jangkauan layanan KB bagi keberhasilan program KB secara umum. Sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan sasaran strategis tersebut pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan KB telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan KB antara lain:

- Peningkatan rasio petugas KB dengan desa/kelurahan
- Pembuatan media dan materi promosi KB
- Peningkatan pembinaan ke tingkat desa/kelurahan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB selain kondisi geografis juga masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan anggaran daerah yang secara umum masih relatif kecil. Kondisi sosial budaya masyarakat juga cukup berpengaruh terhadap pencapaian kualitas layanan KB. Terkait dengan meningkatnya angka drop out KB ini tentu hasil yang tidak menggembirakan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tetapi di sisi lain merupakan realitas yang harus diterima sebagai sebuah fakta. Dari evaluasi sementara salah satu penyebab meningkatnya *drop out* KB adalah faktor ekonomi dimana sebagian akseptor KB mandiri karena kondisi ekonominya, terpaksa drop out. Terkait dengan kondisi ini sebenarnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengantisipasi dengan program-program pemberdayaan ekonomi bagi akseptor. Namun disadari intervensi program tersebut belum mampu menjangkau pada semua akseptor yang memerlukan. Selain itu terkait kinerja petugas lapangan kerja juga perlu terus ditingkatkan. Sebagai lembaga yang terakhir masuk menjadi SKPD Kabupaten

Wonosobo setelah sebelumnya cukup lama menjadi instansi vertikal perlu upaya yang lebih serius untuk melakukan akselerasi secara kelembagaan maupun personalianya. Diakui ketika masih menjadi instansi vertikal dengan dukungan sumber daya yang lebih memadai kinerja aparaturnya juga lebih baik. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa menjadi alasan atas capaian kinerja saat ini. Peluang ketika masuk dalam jajaran SKPD Pemkab Wonosobo adalah peluang kerjasama dan koordinasi yang lebih luas dengan SKPD lain. Ini yang kedepan perlu terus ditingkatkan.

3) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 106.28 persen atau melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hasil ini diperoleh dari pengukuran atas dua indikator kinerja yaitu:

- a) Angka penurunan TFR / Total fertility Rate. Capaian kinerja indikator ini mencapai 112.56% melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 Angka TFR tergetnya adalah 2.24 tetapi realisasinya mencapai 1.99.
- b) Angka penurunan laju penduduk, capaian indikator ini mencapai 100 persen. Dimana target tahun 2012 angka penurunan laju penduduk 1.00 tercapai.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan isu penting bagi pembangunan daerah. Karena laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan akan tidak banyak berarti apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan seperti lapangan kerja, fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Melihat korelasi tersebut pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan perhatian serius bagi upaya penurunan laju pertumbuhan

penduduk. Dari pengukuran kinerja atas sasaran strategis penurunan laju penduduk hasil yang diperoleh cukup mengembirakan.

Selain karena faktor pengembangan program pendidikan KB bagi masyarakat dan remaja khususnya, capaian tersebut merupakan kontribusi yang bersifat lintas sektoral dalam mendorong keberhasilan program KB terutama terkait isu penundaan usia pernikahan. Beberapa tahun lalu di sebagian wilayah Kabupaten Wonosobo isu pernikahan dini merupakan salah satu isu serius yang kemudian menjadi isu lintas sektor. Sebagai ilustrasi melalui program pendidikan dasar sembilan tahun yang diikuti dengan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat cukup memberi kontribusi positif bagi penundaan usia pernikahan. Dengan penundaan usia pernikahan hasil yang ingin dicapai adalah memperpendek masa fertilitas. Ketika itu terjadi maka peluang untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk akan meningkat.

Prioritas Keempat Bidang Infrastruktur

Prioritas pembangunan bidang infrastruktur mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten
- Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan
- Peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jalan desa

Capaian kinerja bidang infrastruktur untuk tahun 2012 sebesar 54.04 persen yang diperoleh dari pengukuran capaian sasaran strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten

Sasaran strategis ini mempunyai dua indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerjanya, yaitu:

- Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2012

adalah 174.16 kilo meter jalan dengan kondisi baik. Realisasinya sampai akhir tahun 2012 panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan hanya terealisasi 65.48 kilo meter. Dari realisasi tersebut capaian kinerjanya sebesar 37.60 persen. Capaian ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

- Panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan adalah 164.96 kilo meter. Realisasinya sampai dengan akhir tahun 2012 hanya menvcapai 65.48 kilo meter. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 39.70 persen. Capaian ini juga masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dari pengukuran dua indikator tersebut, capaian kinerja dari sasaran strategis peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten hanya sebesar 38.65 persen. Melihat hasil capaian peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten yang masih cukup rendah tersebut ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo ke depan. Karena infrastruktur sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan

Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja persentase jumlah jembatan kondisi baik. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 72.24 persen. Tetapi realisasinya sampai akhir 2012 hanya 16.96 persen. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun 2012 adalah 23.47 persen.

Capaian kinerja peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan yang masih jauh dibawah target ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berbukit-bukit dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan potensi kerusakan jembatan cukup tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki daerah rawan longsor yang senantiasa mengancam kondisi jembatan yang ada. Debit air yang cukup tinggi terutama pada musim hujan dan dengan material erosi berupa lumpur dan batu yang terbawa air menjadi ancaman bagi kualitas jembatan di Kabupaten Wonosobo.
- Kemampuan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya keuangan menjadikan program peningkatan kualitas jembatan berjalan lambat. Kemampuan Pemerintah kabupaten Wonosobo masih belum sebanding bahkan jauh dengan kebutuhan untuk perbaikan maupun pemeliharaan jembatan yang tersebar di seluruh pelosok kabupaten.

3) Peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jalan desa

Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja jumlah panjang jalan desa kondisi baik. Target kinerja untuk indikator ini, didasarkan pada realisasi 2011 adalah 1.064.95 kilo meter. Sedangkan dari hasil perhitungan sampai dengan akhir tahun 2012 realisasi jumlah panjang jalan desa kondisi baik adalah 1.064.95 kilo meter. Dengan realisasi tersebut capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100 persen.

Untuk peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jalan desa capaian kinerjanya cukup baik. Hal ini karena dalam beberapa tahun terakhir untuk infrastruktur jalan desa tengah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dengan infrastruktur yang cukup baik ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas masyarakat baik untuk kegiatan perekonomiannya maupun akses pada layanan kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun capaian kinerjanya cukup baik bukan berarti tidak ada

kendala dan tantangan yang dihadapi. Sekali lagi terkait tingginya curah hujan dan kondisi tanah yang tidak stabil menjadikan nilai guna infrastruktur jalan desa seringkali dibawah target yang diharapkan. Selain itu kualitas pengerjaan juga menjadi persoalan yang perlu dicermati. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum perlu terus memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa agar kualitas pengerjaan lebih baik.

Prioritas Kelima: Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan mencakup empat sasaran strategis yaitu:

- Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama
- Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura
- Meningkatnya produksi hasil budidaya peternakan
- Meningkatnya layanan irigasi teknis

Capaian kinerja atas empat sasaran strategis tersebut adalah 101.73 persen dari target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2012. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari pengukuran atas capaian indikator sebagai berikut:

1) Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama

Sasaran startegis peningkatan ketersediaan bahan pangan utama diukur dari indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pangan utama dan tingkat skor pola harapan pangan. Capaian kinerja atas dua indikator tersebut adalah 103.8 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.

- Persentase ketersediaan bahan pangan utama target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2012 adalah 100 persen. Sedangkan realisasinya mencapai 120.90 persen. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ketersediaan bahan pangan utama mencapai 120.90 persen atau melampaui target kinerja yang ditetapkan.

- Tingkat skor pola harapan pangan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonoosbo untuk tahun 2012 adalah sebesar 96 persen. Sedangkan realisasinya hanya 84 persen. Sehingga capaian kinerja untuk indikator tingkat skor pola harapan pangan adalah 87.50 persen.

Isu ketersediaan bahan pangan utama merupakan isu penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Meskipun capaian kinerja untuk tahun 2012 mampu melampaui target yang telah ditetapkan namun ada beberapa hal strategis yang perlu mendapat perhatian terkait ketersediaan bahan pangan utama kedepan. Pertama, terkait meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Alih fungsi lahan ini dari tahun ketahun cenderung meningkat dengan cepat. Terlebih beberapa wilayah yang masuk dalam kawasan lumbung pangan atau daerah utama penghasil bahan pangan menjadi wilayah yang banyak diminati untuk pemukiman dan sejenisnya. Kedua, produktivitas bahan pangan utama untuk tahun 2012 juga menurun. Selain karena serangan hama ketersediaan irigasi teknis juga masih menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan.

2) Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura

Hasil pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis ini mencapai 101.45% dari target dalam penetapan kinerja. Nilai tersebut didapat dari pengukuran atas empat indikator kinerja yaitu:

- a. Produksi tanaman pangan yang mencapai 89.50%
- b. Produktifitas tanaman pangan yang mencapai 90.30%
- c. Produksi tanaman hortikultura yang mencapai 125.58%
- d. Produktivitas tanaman hortikultura yang mencapai 100.40%

Secara umum pada tahun 2012 untuk sasaran peningkatan produktivitas pangan dan hortikultura realisasinya cukup baik dengan angka komulatif diatas seratus persen. Meskipun demikian yang patut

dicermati terkait capaian kinerja untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan. Dua indikator tersebut untuk tahun 2012 capaiannya masih dibawah target. Beberapa hal penting terkait dengan capaian tersebut antara lain, terjadinya serangan hama tikus terhadap komoditas pangan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2012 dan masih terjadi di sebagian wilayah sampai dengan akhir tahun 2012. Selain itu juga faktor cuaca yang menyebabkan beberapa wilayah yang mengandalkan pengairan tadah hujan hanya mampu sekali melakukan penanaman. Ini yang agak berbeda dengan komoditas hortikultura dimana kebutuhan air tidak terlalu besar. Sehingga capaian untuk komoditas tersebut cukup baik mampu melampaui target.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melakukan beberapa langkah strategis guna peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan utamanya komoditas padi. Antara lain dengan mengembangkan program pembangunan jaringan irigasi usaha tani maupun peningkatan jalan usaha tani dan program peningkatan produksi, produktivitas serta mutu tanaman pangan.

3) Meningkatnya populasi dan produksi hasil budidaya peternakan-perikanan

Peningkatan produksi hasil budidaya peternakan-perikanan mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya produksi ikan budidaya dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target produksi perikanan budidaya sebanyak 5.295 ton. Realisasinya sampai akhir tahun 2012 sebanyak 6.894 ton. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 130 persen. Membaiknya harga komoditas perikanan budidaya telah mendorong masyarakat untuk menjadikan budidaya perikanan sebagai salah satu usaha yang layak ditekuni. Promosi

untuk meningkatkan konsumsi ikan saat ini juga terus dilakukan sebagai upaya pemenuhan protein hewani bagi masyarakat.

Di tengah perkembangan yang cukup menggembirakan ini sebenarnya juga ada persoalan yang perlu diperhatikan yaitu terkait ketersediaan bibit ikan budidaya yang berkualitas. Saat ini masih sangat terbatas pembibitan yang dikembangkan oleh masyarakat baik kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga untuk keperluan budidaya bibit sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah. Ini merupakan peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b) Meningkatnya produksi benih unggul

Sasaran ini diukur dari indikator kinerja produksi benih unggul Balai Benih Ikan/BBI. Tahun 2012 target yang ditetapkan sebanyak 345.000 ekor bibit yang dihasilkan oleh BBI. Tetapi sampai akhir 2012 realisasinya hanya 148.000 ekor. Jauh dibawah target yang ditetapkan. Dengan realisasi tersebut capaian kinerja untuk indikator ini hanya 43 persen. Salah satu kendala dalam upaya peningkatan produksi bibit unggul adalah keterbatasan SDM yang mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pembibitan. Tenaga fungsional khusus untuk pembibitan masih sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap bibit unggul makin meningkat. Sehingga perlu upaya yang lebih seius dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi benih unggul.

c) Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan.

Capaian kinerja dari sasaran ini mencapai 135 persen melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Untuk populasi ternak target sasaran rata-rata terlampaui kecuali untuk populasi ternak besar kerbau dan sapi. Untuk populasi kerbau dari target 3.903 ekor, realisasinya hanya 2.163 ekor. Sedangkan untuk sapi target populasi 32.669 ekor realisasinya hanya 27.975 ekor. Tetapi untuk sapi perah mengalami kenaikan. Sementara, untuk ternak kecil cenderung mengalami kenaikan terutama ayam, baik ayam petelur maupun ayam buras. Peningkatan populasi ayam buras dan ayam petelur juga memberikan informasi bahwa usaha dalam bidang ini mulai meningkat. Peningkatan harga komoditas tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha ayam buras maupun petelur. Kondisi ini juga didukung oleh efektifitas pengendalian kasus flu burung dimana pada tahun 2012 dari pantauan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo hanya terjadi sembilan kali kasus flu burung sepanjang tahun. Dimana dari kasus yang muncul semuanya bisa ditangani dengan baik.

4) Meningkatnya layanan irigasi teknis

Capaian kinerja sasaran strategis peningkatan layanan irigasi teknis diukur dari dua indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik. Untuk indikator ini target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar 75 persen. Sedangkan realisasinya 73.65 persen sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 98.20 persen sedikit dibawah target yang ditetapkan.
- Rasio panjang saluran irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani. Untuk indikator ini target yang ditetapkan adalah 20.93 persen dengan realisasi juga sebesar 20.93 persen. Sehingga capaian kinerjanya seratus persen.

Terkait peningkatan layanan irigasi teknis capaian kinerja tahun 2012 sebesar 99.10 persen. Capaian ini didukung kegiatan

rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan sepanjang tahun 2012. Sebagai daerah pertanian irigasi teknis menjadi satu kebutuhan bagi Kabupaten Wonosobo. Meskipun pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang cukup bagus, namun dengan kondisi geografis pegunungan dan curah hujan cukup tinggi, tingkat kefungsi saluran irigasi teknis merupakan faktor yang kedepan perlu lebih diperhatikan. Karena selama ini apabila musim hujan tingkat sedimentasi di saluran irigasi sangat berpengaruh pada kefungsi saluran irigasi tersebut.

Upaya pemeliharaan saluran irigasi teknis juga tidak hanya dengan tindakan sipil teknis tetapi juga dengan perawatan yang melibatkan partisipasi masyarakat petani selaku pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan keterlibatan petani pengguna dalam pemeliharaan saluran cenderung menurun. Sehingga perlu koordinasi antar SKPD terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar kelompok pengguna air/petani bisa menjadi sumber daya dalam pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prioritas Keenam: Konsolidasi Reformasi Birokrasi

Prioritas ini mencakup empat sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Capaian kinerja sasaran startegis ini sebesar 87.35% yang diukur dari capaian indikator kinerja opini hasil pemeriksaan BPK dan persentase rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti. Opini hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 adalah wajar dengan pengecualian. Meskipun temuan pada tahun 2012 relatif turun dibanding tahun 2011 namun masih ada beberapa catatan yang ditemukan pada tahun 2012 yaitu, proses penganggaran belum

se penuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011. Selain itu juga ditemukan SKPD yang sampai akhir bulan Desember pekerjaan fisiknya belum mencapai 100% dan belum ada sanksi bagi SKPD yang mengirimkan SPJ terlambat.

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 telah melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yang lebih akuntabel.

2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dalam dokumen RPJMD 2011-2015 peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 18% dibanding capaian tahun 2011. Pada kenyataannya capaian tahun 2012 mengalami kenaikan mencapai 22.9% dibanding tahun 2011. Sehingga capaian kinerja untuk indikator peningkatan pendapatan asli daerah mencapai 127%. Kontribusi yang cukup menonjol dari peningkatan PAD tersebut diperoleh dari pajak penerangan jalan umum dimana realisasi tahun 2012 mencapai 145.9% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini terealisasi setelah ada upaya intensifikasi dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui DPPKAD dengan PLN. Capaian ini juga tidak lepas dari beberapa program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain:

- Intensifikasi pemungutan pajak
- Pendataan pajak daerah
- Pembinaan petugas pungut
- Perangsang lunas awal PBB

3) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan

Capaian sasaran strategis ini mencapai 92% yang diukur dari capaian empat indikator kinerja yang meliputi:

- 1) Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 2) Prosentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD
- 3) Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD
- 4) Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD.

Terkait dengan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu indikator kualitas sistem perencanaan pembangunan, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Bappeda selaku pengampu urusan perencanaan mampu mencapai 100% target yang telah ditetapkan. Hal tersebut merujuk pada Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana musrenbang untuk tahun 2012 lalu terlaksana sebelum bulan Maret dan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2013 telah ditetapkan melalui peraturan Bupati pada Bulan Mei 2013 atau belum melewati batas yang telah ditentukan yakni bulan Juni 2012.

Untuk kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD capaian pada tahun 2012 lalu masih dibawah target yang telah ditetapkan. Capaian dari indikator ini hanya sebesar 64,45%. Kondisi ini tidak lepas dari proses pembahasan anggaran di tingkat eksekutif dan terutama di tingkat legislatif, juga karena faktor kemampuan keuangan daerah sehingga beberapa program/ kegiatan dalam RKPD tidak terakomodir dalam APBD 2012. Indikator kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD pada tahun 2012 ditetapkan sebesar

80% tetapi realisasinya mampu mencapai 82.91% atau capaian kinerja atas indikator tersebut sebesar 103%. Sedangkan untuk indikator kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 54 tahun 2012 dapat tercapai 100%.

4) Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil

Capaian kinerja sasaran strategis peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2012 mencapai 105.47 persen atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran atas beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK, untuk indikator kinerja ini target capaian tahun 2012 sebesar 80 persen kepemilikan KTP berbasis NIK. Sampai dengan akhir tahun 2012 realisasi atas indikator kinerja tersebut melampaui target yakni sebesar 99.53 persen sehingga capaian kerjanya sebesar 124.4 persen.
- b) Persentase kepemilikan KK, untuk indikator kinerja ini target capaian tahun 2012 sebesar 97 persen kepemilikan KK. Sampai dengan akhir tahun 2012 realisasi atas indikator kinerja tersebut melampaui target yakni sebesar 98.66 persen sehingga capaian kerjanya sebesar 101.7 persen.
- c) Persentase kepemilikan akte kelahiran, untuk indikator kinerja ini target capaian tahun 2012 sebesar 75 persen kepemilikan akte kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2012 realisasi atas indikator kinerja tersebut dibawah target yakni sebesar 62.04 persen sehingga capaian kerjanya sebesar 82.7 persen.

- d) Persentase anak lahir yang membuat akte kelahiran, untuk indikator kinerja ini target capaian tahun 2012 sebesar 87.5 persen. Sampai dengan akhir tahun 2012 realisasi atas indikator kinerja tersebut melampaui target yakni sebesar 99.39 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 113.5 persen.

Kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu sasaran strategis dalam bidang konsolidasi dan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Penataan administrasi kependudukan menjadi penting baik dalam kerangka dasar pengambilan kebijakan maupun dalam kerangka pemenuhan atas hak-hak masyarakat.

Terkait dengan capaian kinerja sasaran ini, dari pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan tingkat capaian yang cukup bagus. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta jajaran pemerintah kecamatan telah mampu melakukan percepatan atas capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa program yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penerbitan dokumen kependudukan
3. Pengembangan sumber daya manusia terkait pelayanan administrasi kependudukan.

Meskipun capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan tetapi Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait peningkatan kualitas administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo, antara lain:

- Masih harus dilakukan upaya serius untuk membangun kesadaran masyarakat arti penting kepemilikan dokumen

kependudukan. Sehingga tidak mengurus dokumen kependudukan pada saat akan menggunakan saja.

- Sosialisasi terkait kelengkapan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan prosedur pelayanannya. Sehingga kesalahan dalam pembuatan dokumen kependudukan dapat diminimalisir.

Prioritas Ketujuh: Iklim dan Investasi Usaha

Sasaran strategis dari prioritas ini adalah peningkatan investasi daerah. Capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut diukur dari dua indikator kinerja yaitu jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Wonosobo dan nilai investasi yang di investasikan di Kabupaten Wonosobo.

Jumlah investasi

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target sebanyak 2 investasi yang masuk ke Kabupaten Wonosobo. Target tersebut dapat dicapai sesuai target tahun 2012. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100 persen.

Nilai investasi

Target nilai investasi ke Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 adalah sebesar 140.6 milyar rupiah. Realisasinya sampai akhir tahun 2012 mencapai 160.7 milyar rupiah. Sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai investasi capaiannya sebesar 114.3 persen.

Dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja untuk sasaran strategis peningkatan investasi daerah tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 107.15 persen dengan kata lain target yang telah ditetapkan untuk tahun 2012 terlampaui. Hasil tersebut tidak lepas dari program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama tahun 2012. Program-program yang

dilaksanakan pada tahun 2012 untuk mendorong peningkatan jumlah investasi antara lain:

Program peningkatan pelayanan perijinan.

Disadari bahwa perijinan merupakan persoalan yang cukup mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah. Persyaratan administrasi maupun lama proses pengurusan perijinan menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh calon investor. Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang sebelumnya Dinas Pelayanan Terpadu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik bagi calon investor. Sehingga dengan kemudahan tersebut mampu mendorong kenaikan jumlah maupun nilai investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo.

Program peningkatan promosi investasi

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan promosi sabagai sarana untuk memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Wonosobo. Selain mengikuti kegiatan promosi di tingkat regional maupun nasional juga dilakukan promosi produk unggulan dan potensi daerah dan pembuatan sarana prasarana serta materi promosi. Melalui kegiatan tersebut calon investor dan stake holder makin mengetahui potensi yang ada di Wonosobo.

Meskipun capaian kinerja untuk peningkatan investasi di Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik namun masih ada beberapa hal yang perlu terus mendapat perhatian kedepan:

- Regulasi bidang penanaman modal dan perijinan yang

masih perlu diperbaharui, termasuk penyederhanaan proses perijinan.

- Perlu didesain penanaman modal dan perijinan dalam satu pintu.
- Peningkatan daya saing daerah dibidang investasi.
- Peningkatan kualitas dan ketrampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan investasi di Wonosobo.

Ditingkat koordinasi antar SKPD juga perlu diperkuat terkait peningkatan potensi dan daya saing daerah agar SKPD mempunyai peran dan kontribusi yang lebih jelas bagi arah pengembangan investasi di Wonosobo. Identifikasi potensi investasi dari masing-masing SKPD sesuai dengan bidang tugasnya perlu disinergikan sehingga Wonosobo memiliki data potensi investasi yang lebih komprehensif.

Prioritas Kedelapan: Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas ini mempunyai dua sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik

Capaian kinerja sasaran strategis ini mencapai 85.5 persen yang diukur dari dua indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 90 persen rumah tangga telah menggunakan listrik/ elektrifikasi. Dari target tersebut realisasinya hanya 64 persen rumah

tangga yang menggunakan listrik. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini hanya 71 persen.

- Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan

Untuk rasio ketersediaan daya listrik target untuk tahun 2012 adalah 109 persen. Dari hasil pengukuran untuk penyediaan daya listrik ini mampu terpenuhi dengan capaian kinerja 100 persen.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan program listrik masuk desa. Program ini dilakukan melalui kerjasama dengan PLN Distribusi Jateng dan DIY dalam penyediaan jaringan listrik di pedesaan. Terkait belum terpenuhinya capaian kinerja rumah tangga yang menggunakan listrik dari target 90 persen sementara realisasinya 64 persen ada beberapa faktor penyebab antara lain:

- Kemampuan keuangan pemerintah kabupaten sangat terbatas untuk penyediaan jaringan listrik.
- Program kerjasama dengan PLN dalam penyediaan jaringan listrik juga sangat terbatas, belum sebanding dengan kebutuhan.
- Rumah tangga yang terus bertambah dan munculnya pemukiman baru di wilayah pedesaan yang seringkali masih jauh dari jaringan listrik.

2) Meningkatnya penggunaan energi alternatif.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini menggunakan indikator jumlah ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah tiga buah ijin usaha

pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang dikeluarkan. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2012 adalah satu ijin usaha yang diterbitkan untuk energi alternatif mikro hidro. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 33,33 persen dari target yang telah ditetapkan.

Untuk Kabupaten Wonosobo energi alternatif yang cukup potensial adalah mikro hidro. Sebagai daerah pegunungan dengan aliran sungai yang cukup deras di hampir sepanjang wilayah Kabupaten Wonosobo, pemanfaatan potensi untuk energi mikro hidro sesungguhnya cukup bagus. Namun perkembangan terakhir belum seperti yang diharapkan karena pengalaman di lapangan sampai saat ini pengembangan mikro hidro masih belum cukup ekonomis. Biaya produksi untuk listrik yang dihasilkan mikro hidro belum efisien bila dibandingkan dengan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan oleh mikro hidro.

Prioritas Kesembilan: Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Prioritas ini mencakup tiga sasaran strategis yaitu:

1) Berkurangnya lahan kritis

Untuk mengukur penurunan lahan kritis indikator kinerja yang digunakan adalah persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan target luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi adalah 46.75 persen dari luas total hutan dan lahan kritis. Dari hasil pengukuran diketahui target teraliris dengan sangat baik. Capaian kinerja indikator ini mencapai 111 persen. Dimana dari target 46.75 persen realisasinya mencapai 51.91 persen. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui

SKPD terkait terutama Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai *leading sektor* mampu melakukan percepatan proses penanganan lahan kritis melalui berbagai program yang dikembangkan.

Tahun 2012 program kegiatan yang dikembangkan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan lingkungan antara lain:

- Konservasi DAS hulu
- Pengembangan Kebun Bibit Rakyat
- Pengembangan Kebun Bibit sekolah
- Rehabilitasi Hutan dan lahan di Luar Kawasan Lindung
- Rehabilitasi hutan dan lahan dengan bangunan sipil teknis (*gully plug*)

Upaya menurunkan lahan kritis melalui pemulihan dan penyelamatan lingkungan sepanjang tahun 2012 cukup berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung antara lain:

- Dukungan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui beberapa program yang dikembangkan di Kabupaten Wonosobo baik berupa kegiatan DAK maupun kegiatan yang dibiayai melalui bantuan gubernur.
- Partisipasi masyarakat yang mulai meningkat dalam upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan. Perubahan ini salah satunya disokong keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi obyektif Kabupaten Wonosobo yang rawan bencana sehingga memberi pengalaman masyarakat untuk lebih memperhatikan keselamatan lingkungan, agar daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat terus terjaga. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemulihan dan penyelamatan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan hutan rakyat

sebagai salah satu sektor ekonomi yang berpeluang untuk dikembangkan. Dalam konteks ini ekonomi yang berbasis pada lingkungan menjadi salah satu alternatif yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Meskipun demikian disisi lain upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan maupun pola pikir masyarakat terhadap upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan harus terus dilakukan. Sehingga kedepan masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan.

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas air

Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air indikator kinerja yang digunakan meliputi:

a) Kualitas/kelas air

Untuk kualitas kelas air target yang ditetapkan adalah kualitas kelas air satu. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2012 belum dilakukan pengukuran ulang terhadap kualitas air di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum memiliki tenaga fungsional khusus yang mampu membaca dan melakukan analisis sampel air. Kedua, keterbatasan anggaran untuk penelitian karena untuk uji kualitas air dengan sampel di beberapa titik membutuhkan dana yang cukup besar. Pengukuran kualitas air di Kabupaten Wonosobo terakhir dilakukan tahun 2010 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Itu pun pengukuran baru

dilakukan untuk DAS Sungai Serayu. Sehingga tahun 2012 belum bisa dilakukan pengukuran kinerja untuk indikator ini.

b) Persentase kelestarian sumber air

Untuk persentase kelestarian sumber air target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah 40

persen sumber air terjaga kelestariannya. Dari target tersebut sampai akhir tahun 2012 realisasinya mencapai 30 persen. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini sebesar 75 persen.

c) Persentase peningkatan debit sumber air

Target tahun 2012 untuk persentase peningkatan debit sumber air yang ditetapkan adalah sebesar 40 persen. Dari hasil pengukuran atas indikator ini peningkatan debit sumber air mencapai 20 persen. Sehingga capaian indikator kinerja adalah 50 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran terhadap sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Wonosobo diketahui capaian kinerjanya baru sebesar 62.5 persen. Dengan kata lain masih jauh dari target tahun 2012. Upaya pelestarian sumber air merupakan sebuah proses yang tidak singkat sehingga hasilnya belum bisa diukur dalam jangka pendek. Ketika pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan program/kegiatan untuk konservasi sumber air dengan reboisasi pada area sekitar sumber air, baru beberapa tahun kemudian bisa dilihat hasil kegiatan tersebut.

Di tengah capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, Kabupaten Wonosobo sebenarnya terus berupaya untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan lingkungan. Saat ini upaya konservasi untuk wilayah kritis juga terus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sebagai daerah dengan curah hujan cukup tinggi ketersediaan air bersih memang belum begitu menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini berpengaruh pada perilaku masyarakat yang masih kurang memperhatikan kelestarian sumber air.

Kondisi ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menggerakkan masyarakat agar lebih peduli pada kelestarian sumber air.

Selain itu, lahan pertanian yang tersebar di wilayah-wilayah tangkapan menjadikan kemampuan tangkapan air menurun ketika perluasan dan intensifikasi pertanian kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Perambahan hutan beberapa tahun lalu dalam eforia reformasi dampaknya juga belum sepenuhnya bisa ditangani terkait menurunnya debit dan sumber air.

3) Berkurangnya resiko bencana

Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari dua indikator kinerja sebagai berikut:

a) Persentase jumlah meninggal akibat bencana

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target kinerja 2.5 persen. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah meninggal akibat bencana 0.9 persen sehingga capaian kinerja dari indikator ini mencapai 277.77 persen. Melampaui target yang ditetapkan. Tercatat sepanjang tahun 2012 jumlah korban meninggal akibat bencana dua orang. Sedangkan jumlah korban tercatat 228 orang.

b) Persentase tertanganinya dampak bencana

Dalam penanganan dampak bencana Pemerintah Kabupaten Wonosobo target tahun 2012 mampu tercapai dengan baik. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100 persen.

Dari pengukuran capaian kinerja dua indikator tersebut, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran berkurangnya resiko bencana 188.85 persen. Meskipun capaian kinerja untuk tahun 2012 cukup bagus namun untuk meningkatkan kualitas pengurangan resiko

bencana perlu terus didorong untuk mencapai hasil yang optimal. Terkait penanganan dampak bencana harus diakui bahwa penanganan yang diberikan kepada korban bencana harus terus dilakukan perbaikan. Sehingga korban bencana tidak hanya mendapatkan penanganan yang bersifat sesaat tetapi juga penanganan pasca bencana.

Secara geografis Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang rawan bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Dari catatan kejadian bencana sepanjang tahun 2012, bencana tanah longsor paling sering terjadi. Kondisi obyektif penanganan bencana di kabupaten Wonosobo banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Luasnya daerah rawan bencana
- Masih terbatasnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik sarana komunikasi, transportasi maupun sarana prasarana untuk penanganan korban bencana.
- Masih terbatasnya jumlah personil yang dalam penanganan bencana.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana antar SKPD dan stake holder lain karena kelembagaan penanggulangan bencana masih bersifat *ad hoc*.

Meskipun masih banyak tantangan dalam penanganan bencana di Kabupaten Wonosobo, namun dari pengukuran indikator kinerjanya menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi beberapa hal berikut:

- Keterlibatan masyarakat sekitar dan kelompok-kelompok masyarakat yang secara aktif memberikan bantuan kepada korban bencana.
- Peran aktif dari Tim SAR baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi.

- Peran Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana.
- Peran media yang mempercepat akses informasi bencana bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang konsen pada penanganan bencana.

Prioritas Kesepuluh: Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh

Prioritas ini mempunyai dua sasaran strategis yaitu optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan yang sehat. Capaian kinerja prioritas ini mencapai 106 persen yang diperoleh dari penghitungan atas capaian kinerja sasaran sebagai berikut;

- 1) Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah dengan indikator kinerja persentase penegasan batas kabupaten. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target penegasan batas kabupaten sebesar 100 persen atau seluruh batas kabupaten menjadi target kinerja tahun 2012. Realisasi atas target tersebut sesuai hasil pengukuran mencapai 100 persen. Meskipun capaian sasaran telah mencapai seratus persen namun Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo masih akan meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan daerah. Mengingat dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2012 masih ada beberapa titik yang perlu mendapat penanganan secara lebih detail agar pengelolaan perbatasan ini lebih optimal dan lebih baik.

2) Pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan yang sehat dengan indikator:

- Persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih

Untuk indikator kinerja ini target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2012 adalah 60 persen desa yang memiliki fasilitas air bersih. Sedangkan realisasinya mencapai 64 persen desa yang memiliki fasilitas air bersih. Dengan realisasi tersebut capain kinerja indikator ini mencapai 106.66 persen melampaui target yang telah ditetapkan.

- Area pemukiman kumuh yang tertangani

Untuk indikator area pemukiman kumuh yang tertangani, target tahun 2012 adalah 75 persen pemukiman kumuh tertangani. Sedangkan realisasinya sampai dengan akhir 2012 daerah yang ditangani mencapai 80 persen. Sehingga capain kinerja untuk indikator tersebut mencapai 106.66 persen dari target yang telah ditetapkan.

- Jumlah rumah layak huni yang diperbaiki

Tahun 2012 Pemerintah kabupaten Wonosobo menetapkan target jumlah rumah layak huni yang diperbaiki adalah 2.000 unit. Realisasinya sampai akhir tahun 2012 Pemerintah kabupaten Wonosobo mampu memperbaiki 2.534 unit rumah tak layak huni yang diperbaiki. Dari hasil tersebut capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 126.70 persen jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran strategis pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan yang sehat mencapai 113.34 persen. Capaian yang melampaui target ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program antara lain:

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Program PNPM mandiri pedesaan
- Program Pamsimas
- Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya.

Prioritas kesebelas: Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

Sasaran strategis untuk prioritas ini adalah meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya dan meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna. Capaian kinerja prioritas bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi diperoleh dengan pengururan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya dengan capaian kinerja sebesar 62.5 persen yang diperoleh dari pengukuran atas indikator kinerja berikut:
 - Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi, capaian kinerja dari indikator ini adalah 50 persen. Dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah dua penilitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi. Namun sampai akhir 2012 realisasinya hanya satu kali penelitian yang dilakukan. Sehingga capaian kinerja indikator ini jauh dibawah target yang telah ditetapkan.
 - Jumlah karya seni yang berkualitas, capaian kinerja dari indikator ini mencapai 75 persen dari target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target empat karya seni yang dapat diaktegorikan berkualitas, namun pada kenyataannya hanya tercapai tiga karya seni yang dapat dikategorikan berkualitas.

Sehingga capaian kinerja indikator ini hanya mencapai 75 persen.

2) Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya. Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 63 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh dari pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 60 persen. Dimana pada tahun 2012 Pemerintah kabupaten Wonosobo menetapkan target lima pelaku budaya yang memperoleh penghargaan. Namun sampai akhir 2012 realisasinya hanya tiga pelaku budaya yang mendapat penghargaan.
- Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan lima belas karya budaya memperoleh perlindungan HAKI. Tetapi sampai akhir tahun 2012, hanya sepuluh karya yang memperoleh perlindungan HAKI. Dengan realisasi tersebut capaian kinerja indikator ini sebesar 75 persen.

Untuk prioritas bidang kebudayaan, dari hasil pengukuran atas capaian kinerja indikator strategisnya diketahui hasil yang diperoleh masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini kedepan perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah kabupaten.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya telah melaksanakan beberapa program kegiatan. Tetapi program yang dilaksanakan masih sebatas pada fasilitasi pagelaran atau pentas budaya baik di tingkat lokal, regional maupun tingkat nasional. Kegiatan tersebut selain sebagai bentuk

apresiasi kepada para pelaku budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo, juga sebagai sarana untuk promosi potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga pelestarian budaya yang selama ini dilakukan tidak terlepas dari konteks pariwisata. Untuk kedepan selain memperhatikan konteks pariwisata, pelestarian budaya di Kabupaten Wonosobo, perlu lebih diarahkan untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian karya budaya dengan lebih optimal

- 3) Meningkatkan penggunaan teknologi produksi tepat guna. Capaian kinerja sasaran strategis ini mencapai 91,66 persen yang diperoleh dari pengukuran terhadap indikator jumlah industri kecil yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 600 industri kecil di Kabupaten Wonosobo telah menggunakan teknologi tepat guna. Realisasinya sampai akhir tahun 2012 industri kecil yang menggunakan teknologi tepat guna baru mencapai 550.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengembangkan beberapa program kegiatan untuk mendorong pelaku industri kecil dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk industri kecil. Upaya mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna juga dilakukan dengan fasilitasi peralatan hasil teknologi tepat guna pada kelompok/sentra industri kecil.

Pemanfaatan teknologi terkadang belum efektif ketika produksi masih kecil. Fasilitasi bantuan peralatan kepada kelompok dimaksudkan agar penggunaan teknologi tepat guna ini lebih efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai media pembelajaran bagi pelaku industri kecil dalam memahami dan mempeleajari aspek-

aspek penting penggunaan teknologi bagi kelangsungan usahanya.

Terkait fasilitasi bantuan peralatan ini, sebagian telah menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pelaku industri kecil namun masih ada juga kelompok yang telah difasilitasi alat tetapi pemanfaatannya belum optimal. Sehingga selain fasilitasi alat juga perlu lebih diperhatikan terkait pemanfaatannya dalam meningkatkan produktivitas industri kecil melalui monitoring dan pembinaan secara periodik bagi kelompok dan pelaku industri kecil.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan sebesar Rp 1.107.938.250.383,00 dapat direalisasi Rp 986.537.089.060,00 atau 89,04% terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 866.285.875.015,00 dapat direalisasi sebesar Rp 795.100.056.461,00 atau 91,78%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 238.652.375.368,00 dapat direalisasi sebesar Rp 189.467.145.999,00 atau 79,39%, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 1.969.886.600,00 atau 65,66%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel

Uraian Belanja Tahun 2012

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi		
Belanja Pegawai	585.544.254.888,00	548.377.886.205,00
Belanja Barang dan Jasa	215.220.017.159,00	183.465.535.843,00

Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	16.263.102.968,00	15.543.085.255,00
Belanja Bantuan Sosial	3.707.500.000,00	3.119.979.979,00
Belanja Bantuan Keuangan	45.551.000.000,00	44.593.569.179,00
Jumlah Belanja Operasi	866.285.875.015,00	795.100.056.461,00
Belanja Modal		
Belanja Tanah	9.864.000.000,00	18.066.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	48.551.667.168,00	44.680.236.458,00
Belanja Gedung dan Bangunan	52.983.335.800,00	39.730.630.135,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.604.247.400,00	94.827.194.198,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.639.190.000,00	10.201.146.708,00
Belanja Aset Lainnya	9.935.000,00	9.872.500,00
Jumlah Belanja Modal	238.652.375.368,00	189.467.145.999,00
Belanja Tidak terduga	3.000.000.000,00	1.969.886.600,00
Jumlah Belanja TT	3.000.000.000,00	1.969.886.600,00
Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	1.107.938.250.383,00	986.537.089.060,00